

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- A. Fadhil Lubis, "Peluang Dan Tantangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Lahirnya Uu No. 3 Tahun 2006," *Suara Uldilag* 3, No. XII (2008).
- A.M.As'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Abdurrahman, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan MK No. 93/PUU/X/2012)," *Varia Peradilan* 335, (2013).
- Ali, Moh. Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Press,1992).
- Al-Juhaili, Wahbah *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, *et all*, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Antonio, M.Syafi'i, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006).
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
- Asshiddiqie, Jimly *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Asshiddiqie, Jimly, *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negra Hukum Indonesia*, (Padang: Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis Ke 53 Fakultas Hukum Universitas Andalas, 6 September 2004).
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PIB, 2004).
- Black Henry Campbell (ed), *Black,s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of Amerikan and English Jurirprudence Ancient and Modern*, (Amerika:West Publishing Co, 1990).
- Campbell, Henry, *Balck's Law Dictionary*, (Amerika Serikat: West Publishing Co., 1978).
- Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007).
- Dadan Muttaqien, "Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Perbankan Syariah Pasca Disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah", *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 70 (2010).

- Darus Badrul Zaman, Mariam, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1991).
- Daud, A.Wahab, *H.I.R. Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Pusbakum, Cet. ke-3, 2002).
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Ditjen Badilag, 2010.
- Ghofar Anshori, Abdul, *Hukum Perbankan Syariah (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).
- Hadiwijaya, H, *Beberapa Segi Mengenai Perkreditan* (Bandung: Pionir Jaya, 1993).
- Halim, Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Harahap, M. Yahya *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986).
- Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1988).
- Harahap, M.Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Bandung: Sinar Grafika, 2007).
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Hasan, Hasbi, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010).
- Indrayana, Denny dan Zainal Arifin Muchtar, *Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PPHIM, 2007.
- Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009).
- Latif, Abdul Latif, *et all. Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995)
- M.Gaffar, Jenedjri, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Makalah Mahkamah Konstitusi

- Republik Indonesia, 2009, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, (3 Pebruari 2017).
- M. Hadjon, Philipus M, "Tentang Wewenang," *Yuridika*, No. 5 dan 6 tahun XII (1997).
- Mahadi, *Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Dirbinpera Departemen Agama RI, 1985).
- Mahfud, Moch. M.D., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3S, 2007).
- Mertokusumo, Soedikno, *Komptensi Peradilan Agama Relatif dan Absolut dalam Kapita Selekta Hukum Perdata Agama dan Penerapannya* (Bogor: Pusdiklat Teknis Bailtbang Diklat Kumdil MARI, 2008).
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993).
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008).
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja, *Hak Tanggungan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muljono, E. Liliawati, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Oleh Perbankan*, (Jakarta: Harwarindo, 2003).
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Poesoko, Herowati, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan* (Yogyakarta: LaksbangPressindo, 2007).
- Prayudi, Guse, *Jaminan Dalam Perjanjian Utang Piutang* (Yogyakarta: Merkid Press, 2008).
- Rahman, Abdul dan Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Remy Sjahdeini, Sutan, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007).
- Rianto Al-Arif, M. Nur, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, t.th).

- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Diterjemahkan oleh Noe Hasanuddin, Jilid III, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007).
- Siahaan, Maruar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Sjahdeni, St. Remy, *Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*, (Bandung: Alumni, 1999).
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung, Mandar Maju, 2005).
- Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Gita Karya, 1963).
- Soeripto, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Menguji Undang-Undang (Judicial Review)*, [http// www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id). (2 Pebruari 2017).
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta:PT. Pradaya Paramita, 1996.
- Suharso, *et all*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang : CV.Widya Karya, t.th.
- Suhartono, “Paradigma Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia,” *Mimbar Hukum Journal of Islamic Law*, No. 66 (2008).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Alumni, 1986.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984).
- Wibowo, Edy, *et all*, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undaangan yang Baik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

Zainal Arifin Hoesein, “Undang-Undang Peradilan Agama dan Perbankan Syariah dalam Perspektif Ketatanegaraan Menurut UUD 1945,” *Mimbar Hukum: Journal of Islamic Law* 70 (2010).

## **B. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan**

Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Tanggal 29 Agustus 2013,” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta: t.th.

Republik Indonesia, “Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung,” dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2016.

Republik Indonesia, “Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2016.

Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2016.

Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,” dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2016.

Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2016.

Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT),” dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2016.

Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2016.

Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.